JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 11 No. 2 Tahun 2025
DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.02.1

Bayang-Bayang yang Memisah: Fragmentasi Kader dan Kuasa Personal di PDI Perjuangan Bali

Adinda Paramitha Mayan[1], I Ketut Putra Erawan[2], Gede Indra Pramana[3]
[123]Program Studi Ilmu Politik, Universitas Udayana, Indonesia

Abstract. *This article discusses the modularization process of the PDI Perjuangan Bali and its impact on cadre mobility ahead of the 2024 Pilkada. Modularization is understood as a shift in the party's function from an ideological house to a pragmatic forum that relies on the personal strength of cadres to maintain its electoral base. This study aims to determine whether the modularization process influences the migration of PDI Perjuangan Bali cadres to other parties and how this migration affects vote distribution. The theories used as analytical tools are the modular parties theory by Novaes (2015) and the logic of constituency representation framework by Kitschelt (1988). This study uses a qualitative method with a case study approach on three cadres, namely: Putu Agus Suradnyana, I Nyoman Mulyadi, and I Putu Alit Yandinata. There are two important findings in this study: 1) The migration of cadres from PDI Perjuangan is the result of rational calculations due to the party's dependence on the cadres' personal political capital, so that the support base can be transferred to a new political vehicle. 2) The support modules possessed by each cadre were able to mobilize significant votes, but were not enough to defeat the dominant party machine, so that the PDI Perjuangan maintained its dominance in Bali. Scientifically, this research contributes to strengthening the understanding of the institutional dynamics of political parties at the local level, especially regarding the modularization process that influences the relationship between parties and cadres in the context of regional electoral politics.*
Keywords: *Political Parties, Party Switching, Political Actors, 2024 Regional Elections, and Modular Parties*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang proses modularisasi PDI Perjuangan Bali dan dampaknya terhadap mobilitas kader menjelang Pilkada 2024. Modularisasi dipahami sebagai pergeseran fungsi partai dari rumah ideologi menjadi wadah pragmatis yang mengandalkan kekuatan personal kader untuk mempertahankan basis elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses modularisasi mempengaruhi berpindahnya kader PDI Perjuangan Bali ke partai lain serta bagaimana perpindahan tersebut mempengaruhi distribusi suara. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori *modular parties* dari Novaes (2015) dan kerangka *logic of constituency representation* dari Kitschelt (1988). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap tiga kader yaitu: Putu Agus Suradnyana, I Nyoman Mulyadi, dan I Putu Alit Yandinata. Terdapat dua temuan penting dalam penelitian ini: 1) Perpindahan kader dari PDI Perjuangan merupakan hasil kalkulasi rasional akibat ketergantungan partai pada modal politik personal kader, sehingga basis dukungan dapat dipindahkan ke kendaraan politik baru. 2)Modul dukungan yang dimiliki masing-masing kader mampu menggerakkan suara signifikan, namun belum cukup untuk mengalahkan mesin partai dominan, sehingga PDI Perjuangan tetap mempertahankan dominasinya di Bali. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai dinamika kelembagaan partai politik di tingkat lokal, khususnya tentang proses modularisasi yang mempengaruhi relasi antara partai dan kader dalam konteks politik elektoral daerah.
Keywords: Partai Politik, *Party Switching*, Aktor Politik, Pilkada 2024, dan Partai Modular

Received: 10/08/2025 *Revised: 13/11/2025* *Accepted: 03/12/2025*

Korespondensi:
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Udayana
Email: dindamyn@gmail.com

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan sarana representasi kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Lijphart (1977) bahwa partai politik berfungsi sebagai penyalur aspirasi berbagai kelompok etnis, agama, budaya, dan kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya partai politik kerap menunjukan disfungsi peran, seperti melemahnya kaderisasi, dominasi elit, serta ketidakjelasan ideologi. Menurut Edward Aspinall dalam *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia* (2005), bahwa proses demokratisasi tidak terjadi sepenuhnya membawa transformasi menjadi arah yang lebih baik melainkan memperkuat politik patronase dan oligarki di Indonesia.

Fenomena disfungsi ini memperlihatkan bahwa perkembangan partai politik di Indonesia tidak stagnan, tetapi terus bertransformasi sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Perjalanan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut, dari sistem multipartai pada Pemilu 1955 yang kompetitif, masa Orde Baru dengan fusi partai dan dominasi Golkar, hingga era Reformasi yang mengembalikan sistem multipartai namun memunculkan fenomena deideologisasi dan personalisasi politik. Ketidakjelasan ideologi partai politik di Indonesia membuat cara berpikir partai politik di Indonesia mengandalkan cara lain untuk mempertahankan pemilih dengan pola personalistik karena ideologi dan program-program rasional tidak terlalu menarik bagi pemilih.

Hubungan patron-klien dalam tubuh PDI Perjuangan Bali mulai menunjukan pola yang mengikuti logika permintaan (*demand)* politik daripada fondasi ideologis yang mapan. Proses kaderisasi dan pembentukan loyalitas pemilih tidak lagi beroperasi dalam kerangka ideologis yang mapan, tetapi bergeser mengikuti selera pasar politik yang dibentuk oleh berbagai faktor eksternal seperti dinamika politik lokal, jaringan adat, hingga figur populer (Erviantono, Zuryani, & Vandenberg, 2024). Ketika pasokan (*supply)* yang ditawarkan partai tidak sejalan dengan preferensi pemilih, kader cenderung menyesuaikan diri dengan permintaan pasar sehingga terjadi pelemahan ideologis. Dalam logika ini, permintaan (*demand*) yang terus

berubah di tingkat lokal menciptakan tekanan bagi kader untuk membangun dan mengelola modul politik secara fleksibel, mengikuti logika berpikir politik klientelistik bahwa keberhasilan elektoral ditentukan oleh kemampuan broker membaca pasar dibandingkan konsistensi ideologis (Aspinall, 2014).

Konsekuensinya, mekanisme institusionalisasi partai semakin bergantung pada pasar politik yang dicari dan kompetitif, dimana kekuatan elektoral diukur dari kapasitas aktor penghubung merespon kondisi politik lokal. Kondisi ini mempercepat pergeseran peran partai dari rumah ideologi menjadi sekedar kendaraan elektoral yang operasinya ditentukan oleh dinamika *supply-demand,* dengan resiko mengikis daya tahan kelembagaan partai dalam jangka panjang (Mainwairing & Zoco, 20017). Hal tersebut mengakibatkan muncul fenomena perpindahan kader partai politik untuk memenuhi kepentingan personal yang tidak terakomodir, seperti kegagalan mendapatkan rekomendasi pencalonan. Hal ini menunjukkan bahwa kalkulasi pragmatis untuk mencapai kekuasaan telah mengesampingkan loyalitas ideologi. Partai tersebut bergeser dari rumah ideologis menjadi sekedar kendaraan elektoral yang pragmatis.

Fenomena perpindahan kader partai politik, yang sering disebut sebagai *party switching* atau "nomadisme politik," telah menjadi pemandangan lazim dalam lanskap politik Indonesia pasca-Reformasi. Meskipun tidak dilarang undang-undang, praktik ini dapat melemahkan pelembagaan partai jika terus berulang. Menurut Lijphart (1999), pada negara-negara demokrasi yang cukup maju, setianya politisi terhadap partainya harus didukung dengan kematangan institusi partai dan integritas politik yang dikonsolidasikan. Fenomena serupa juga terjadi di negara lain; di Italia, misalnya, seperempat anggota parlemen berpindah partai antara 1996–2004 (Heller & Mershon, 2005, 2008), dan kasus serupa ditemukan di Prancis, Republik Ceko, Hungaria, dan Rusia (White et al., 1997). Fenomena ini bukan sekadar cerminan pragmatisme individu, melainkan sebuah gejala yang mengungkap dinamika struktural yang lebih dalam terkait institusionalisasi dan ideologi partai politik di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dalam konteks yang unik: perpindahan kader-kader senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Provinsi Bali, sebuah wilayah yang secara historis dikenal sebagai basis massa dan "kandang banteng" yang solid. Kasus ini menjadi sebuah teka-teki politik: apakah proses modularisasi mempengaruhi berpindahnya kader PDI Perjuangan Bali ke partai lain serta bagaimana perpindahan tersebut mempengaruhi distribusi suara?

Artikel ini berargumen bahwa penjelasan konvensional yang berfokus pada konflik internal atau oportunisme politik tidak cukup untuk membedah kompleksitas fenomena ini. Sebaliknya, perpindahan kader ini merupakan konsekuensi logis dari proses "modularisasi" yang sedang dialami oleh PDI Perjuangan Bali. Mengacu pada kerangka teori modular parties yang diajukan oleh Lucas Martin Novaes, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur PDI Perjuangan Bali telah berevolusi menjadi sebuah sistem yang sangat bergantung pada kekuatan figur-figur personal kader sebagai "aktor penghubung" (*brokers*) untuk memobilisasi massa. Para kader ini diberi otonomi untuk membangun dan mengelola "jaringan pemilih" atau "modul" mereka sendiri. Ketergantungan inilah yang secara inheren menciptakan kondisi yang memungkinkan pembelotan mereka menjadi mungkin dan berdampak signifikan, karena ketika seorang kader keluar, mereka tidak pergi sendiri, melainkan membawa serta modul dukungan yang telah mereka bangun secara personal.

Paradoksnya, justru dominasi PDI Perjuangan yang menciptakan kondisi subur bagi modularisasi itu sendiri. Rasa aman yang berlebih membuat partai cenderung "mengalihdayakan" (*outsourcing*) tugas mobilisasi massa kepada figur-figur lokal yang kuat, dengan asumsi loyalitas mereka akan tetap terjaga. Praktik ini secara tidak langsung menciptakan pusat-pusat kekuasaan otonom di tingkat lokal yang pada akhirnya menjadi cukup kuat untuk menantang struktur partai ketika ambisi personal mereka terhalang. Dengan demikian, kekuatan partai secara paradoksal menabur benih-benih fragmentasi internalnya sendiri.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dominasi partai dalam demokrasi klientelistik pada dasarnya tidak stabil dan menuntut negosiasi terus-menerus dengan para pemimpin lokal yang kuat, alih-alih didasarkan pada kontrol institusional

atau ideologis yang kokoh. Mekanisme dibalik operasionalisasi modul-modul ini dapat dipahami melalui konsep brokerage dan relasi patron-klien, yang merupakan praktik lazim dalam politik Indonesia. Kader yang berperan sebagai broker memediasi hubungan antara partai dan pemilih, sering kali melalui pertukaran sumber daya material atau non ekonomi, yang membentuk ikatan loyalitas personal antara broker dan kliennya (pemilih). Akibatnya, fungsi representasi politik bergeser.

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *logic of constituency representation* oleh Herbert Kitschelt, representasi tidak lagi dijalankan oleh partai sebagai sebuah institusi, melainkan oleh individu-individu yang memiliki koneksi personal dengan masyarakat. Dengan berfokus pada tiga studi kasus perpindahan kader PDI Perjuangan Bali—Putu Agus Suradnyana, I Nyoman Mulyadi, dan I Putu Alit Yandinata—dalam Pilkada 2024, penelitian ini menjawab pertanyaan sentral: "Apakah modularisasi yang dialami partai PDI Perjuangan Bali mempengaruhi perpindahan kader PDI Perjuangan Bali dalam Pilkada 2024?". Kontribusi artikel ini terletak pada penerapan teori modular parties yang relatif baru untuk menganalisis sebuah partai dominan dalam konteks politik sub-nasional di Indonesia, sehingga menawarkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang dinamika kelembagaan, pragmatisme, dan kerapuhan partai politik kontemporer.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *modular parties* dari Lucas Martin Novaes (2015). Menurut Novaes (2015), partai modular adalah partai yang membangun hubungan dengan pemilih tidak secara langsung, melainkan melalui perantara (aktor penghubung) seperti tokoh lokal atau kader yang memiliki jaringan klien sendiri. Aktor penghubung ini bertindak sebagai "pemilik" sah dari jaringan pemilih atau "modul" tersebut, dan dapat memindahkannya dari satu partai ke partai lain. Kelemahan dari model ini adalah tingginya ketergantungan partai pada aktor penghubung yang bisa berkhianat atau berpindah kapan saja.

Sebagai teori pendukung, digunakan kerangka *logic of constituency representation* dari Herbert Kitschelt (1988). Kitschelt (1988) berpendapat bahwa partai dapat terbentuk tidak hanya untuk memenangkan pemilu, tetapi juga untuk merepresentasikan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks

penelitian ini, kerangka ini diperbarui: fungsi representasi yang idealnya dijalankan oleh partai secara institusional, kini justru digeser dan dijalankan oleh individu (kader atau broker) secara personal. Ketika kader ini berpindah, komunitas pemilih yang direpresentasikannya pun cenderung ikut berpindah. Hubungan patron-klien adalah hubungan timbal balik asimetris di mana patron (kader) memberikan sumber daya material kepada klien (pemilih) sebagai imbalan atas dukungan politik (Novaes, 2015). Sementara itu, *brokerage* merujuk pada peran kader sebagai perantara politik (*broker*) yang menghubungkan elit dengan massa. Broker ini sering kali bertindak oportunistis dan dapat berpindah dukungan jika ada tawaran yang lebih menguntungkan (Aspinall, 2014).

Fenomena ini sejalan dengan temuan Irma Rachmayani dan Arizka Warganegara (2022), yang mengungkap lemahnya institusionalisasi PDI Perjuangan serta dominasi elit partai, sehingga menyebabkan hubungan partai-pemilih melemah. Dalam konteks lokal, mobilisasi politik pun beralih menjadi lebih personal dengan mengandalkan aktor-aktor penghubung (broker) yang memiliki basis massa. Sebagai sebuah perbandingan, peneliti mengutip penelitian Muhammad Ridha T.R dalam "Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan" bahwa partai Golongan Karya berusaha melembagakan dirinya secara terpaksa melalui hubungan patron-klien untuk tetap bertahan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Dalam konteks lokal khususnya di Bali, penerapan modular parties juga melibatkan konteks desa adat atau banjar yang menjadi sebuah tempat perkumpulan klien. Menurut Erviantono, Zuryani, dan Vandenberg (2024) dalam karyanya yang berjudul "Modular Parties, Customary Networks, and Constructivist Institutionalism", partai modular yang beroperasi di Bali dalam konteks pemenangan pemilihan legislatif melibatkan jaringan adat dengan penguatan wacana terkait pelestarian adat, budaya lokal dan kesejahteraan. Hasil penelitian yang ditemukan ialah adanya hubungan jaringan adat, agen bebas dan politisi *incumbent* yang membentuk sebuah pola patron-klien yang kemudian memperkuat jaringan antara pemilih dan kandidat untuk memenangkan pemilihan legislatif di Bali.

Penelitian tentang pelembagaan partai politik di Indonesia memang cukup banyak, tetapi umumnya fokus pada kelemahan ideologi partai, oligarki, atau patronase secara umum (Aspinall, 2005; Rachmayani & Warganegara, 2022). Belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti bagaimana modularisasi partai bekerja di tingkat lokal dan memengaruhi perpindahan kader (*party switching*) beserta basis dukungan elektoralnya. Padahal, fenomena ini penting untuk memahami kerentanan partai dalam konteks demokrasi elektoral yang makin personalistik (Novaes, 2015). Dengan mengambil kasus PDI Perjuangan Bali dan tiga kader kunci yang membelot pada Pilkada 2024, penelitian ini menawarkan kontribusi empiris sekaligus teoretis untuk menjelaskan mekanisme modularisasi dan dampaknya terhadap distribusi suara di tingkat lokal.

Penelitian terdahulu terkait proses modularisasi partai politik relatif terbatas. fokus-fokus penelitian terdahulu umumnya berkisar pada hubungan antara elit partai, kandidat dan pemilih secara general. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengaplikasikan konsep modular parties dalam konteks politik subnasional dan partai dominan di tingkat daerah. Keterbatasan tersebut membuka kembali perdebatan empiris dan teoritis dalam memahami bagaimana modularisasi berkerja di level lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena menawarkan perspektif baru dengan menguji relevansi konsep tersebut dalam konteks PDI Perjuangan sebagai partai dominan di Bali.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mendalami dan memahami sebuah fenomena secara mendalam dalam konteks yang nyata, khususnya untuk menjelaskan perilaku, motivasi, serta tindakan subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan semi-terstruktur dengan 11 informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data sekunder digunakan sebagai pendukung dan pelengkap, yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang Pemilu dan Partai

Politik, arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta literatur akademik seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan artikel berita yang relevan dengan topik penelitian.

Informan mencakup tiga kader yang berpindah partai (atau tim suksesnya), pengurus DPD PDI Perjuangan Bali, pengurus DPC PDI Perjuangan di tingkat kabupaten (Badung dan Tabanan), serta masyarakat pemilih yang relevan. Selain wawancara, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas kampanye, media sosial para aktor politik, dan dinamika di lapangan. Ketiga kasus dipilih karena dianggap mewakili tipologi modularisasi, yakni wilayah, komunitas, dan jaringan personal. Masing-masing tipologi menggambarkan tingkat kemandirian kader partai politik diluar struktur partai. Dengan demikian, ketiga kasus yang dipilih dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana proses modularisasi bekerja dalam konteks partai dominan di tingkat subnasional atau daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Modularisasi: Ketergantungan PDI Perjuangan Bali pada Kekuatan Personal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi PDI Perjuangan Bali dalam mempertahankan dominasi elektoralnya sangat bergantung pada modal politik personal kader-kadernya. Ketergantungan ini menciptakan kondisi fundamental bagi terjadinya proses modularisasi. Partai secara sadar menempatkan kader-kader yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai ujung tombak untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. I Nyoman Arnawa, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tabanan, menggambarkan bahwa fraksi partai di DPRD menjadi "garda terdepan untuk turun ke tengah-tengah masyarakat," meskipun ia mengakui bahwa "kemampuannya pun tidak sama". Pernyataan ini mengindikasikan bahwa efektivitas partai di tingkat akar rumput tidak didasarkan pada program yang terstandarisasi, melainkan pada kapabilitas individu yang beragam.

Strategi ini diperkuat oleh I Made Supartha, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, yang menyatakan bahwa partai memang secara sengaja "memberikan posisi kader untuk turun ke tengah masyarakat". Praktik ini selaras dengan preferensi pemilih di tingkat lokal yang cenderung lebih melihat figur personal ketimbang afiliasi

partai. Akibatnya, partai secara efektif "mengalihdayakan" fungsi mobilisasi massa kepada para kadernya. Namun, praktik ini ibarat sebuah "transaksi faustian". Sebagai ganti dari kemenangan elektoral jangka pendek yang efisien, partai menyerahkan kontrol langsung atas basis pemilihnya. Hubungan antara partai dan pemilih tidak lagi bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh kader yang berperan sebagai broker.

Ketergantungan ini memberdayakan kader untuk membangun basis dukungan, jaringan, dan sumber daya secara mandiri. Mereka mulai memandang keberhasilan elektoral bukan sebagai hasil kerja kolektif partai, melainkan sebagai buah dari modal personal mereka sendiri. Temuan ini sejalan dengan analisis Moffitt dan Tormey (2014) tentang *political style* dimana personalisasi menjadi strategi utama untuk membangun koneksi emosional dengan pemilih. Ketika kepentingan personal mereka tidak lagi terakomodasi oleh partai misalnya, ketika gagal mendapatkan rekomendasi pencalonan ikatan loyalitas menjadi rapuh. Mereka merasa memiliki kemandirian untuk bertarung dalam kontestasi politik tanpa perlu membawa bendera partai lama. Fenomena ini menjelaskan mengapa pelembagaan partai di Indonesia tetap lemah; strategi yang digunakan untuk memenangkan pemilu justru menjadi penghalang bagi pembangunan institusi partai yang kuat dan berbasis ideologi. PDI Perjuangan Bali terjebak dalam sebuah siklus dimana strategi elektoral jangka pendeknya secara sistematis merusak integritas institusional jangka panjangnya.

Meskipun PDI Perjuangan memiliki mekanisme sanksi yang tegas, seperti pemecatan bagi kader yang membangkang, fakta bahwa para kader ini tetap dapat maju melalui partai lain dan membawa sebagian basis massanya menunjukkan bahwa unit-unit modular ini dapat beroperasi secara otonom, lepas dari kontrol pusat. Loyalitas terhadap figur terbukti mampu mengalahkan loyalitas terhadap struktur atau ideologi partai, yang merupakan salah satu indikator utama dari proses modularisasi.

Modul Politik: Tiga Studi Kasus Pembelotan

Perilaku pindah partai, rupanya telah menjadi hal yang lumrah di Indonesia dari level nasional hingga level lokal. Jika dikaji lebih mendalam, setidaknya dalam

satu periode pemilu sekurang-kurangnya dua sampai tiga politisi berpindah partai dari satu partai ke partai lainnya. Tidak dapat dipungkiri kebiasaan tersebut telah mendarah daging dalam tubuh politisi Indonesia. Dalam buku Piliang (2005;159) perilaku perpindahan partai yang dilakukan oleh politisi disebut dengan istilah nomadisme politik yang didefinisikan sebagai sebagai kecenderungan perpindahan terus menerus dalam politik, baik dalam konteks individu, kelompok, masyarakat maupun pada konteks personalitas, identitas, dan ideologis.

Fenomena nomadisme politik ini, jika dianalisis melalui perspektif modular sebagai aksioma, mencerminkan pergeseran logika hubungan patron-klien yang semakin mengikuti arah permintaan (*demand)* politik dibandingkan dengan prinsip ideologis yang mapan. Ketika pasokan (*supply)* politik yang ditawarkan tidak sesuai dengan preferensi pemilih, kader sebagai aktor penghubung cenderung melakukan penyesuaian strategi demi mempertahankan basis dukungan dan meninggalkan kerangka ideologis partai. Sehingga, partai semakin bergantung dengan mekanisme pasar dalam mengelola institusionalisasinya, yang membuat kerangka ideologis semakin tergerus dan menyebabkan partai sebagai kendaraan elektoral yang bergantung pada dinamika *supply-demand* politik yang cair.

Hubungan patron-klien tidak lagi didikte oleh "penawaran ideologis dari partai, melainkan oleh "permintaan" pragmatis dari pemilih. Pemilih di tingkat lokal cenderung lebih melihat figur personal ketimbang afiliasi atau ideologi partai (Aspinall, 2019). "Permintaan" mereka Adalah representasi yang personal, aksesibel, dan mampu memberikan manfaat secara langsung (baik material maupun non-material). Akibatnya, fungsi representasi bergeser dari institusi partai ke individu kader. Kader yang sukses adalah mereka yang mampu memenuhi "permintaan" ini secara langsung, bertindak sebagai perantara yang efektif. Ini adalah bukti bahwa institusionalisasi kaderisasi dan loyalitas pemilih tidak dibangun di atas modular ideologis, melainkan atas modul transaksional personal.

Konsekuensi logis dari dinamika permintaan diatas adalah kader harus beradaptasi menjadi "aktor pasar" yang cerdas untuk bertahan dan sukses. Kader secara otonom membangun dan mengelola "jaringan pemilih" atau "modul" mereka sendiri. Mereka memandang keberhasilan elektoral sebagai buah dari modal personal

mereka sendiri, bukan hasil kerja kolektif partai. Para kader ini yang disebut sebagai broker, sangat cakap dalam membaca dinamika preferensi pemilih dan menjaga jaringan mereka secara mandiri. Ketika aspirasi mereka terhalang oleh partai (penawaran partai tidak sesuai), mereka dengan cepat mencari "pasar" atau "kendaraan" baru yang lebih menguntungkan. Alih-alih melakukan kaderisasi ideologis, strategi partai justru ikut dalam logika pasar. Partai secara sadar "mengalihdayakan" (*outsourcing*) mobilisasi massa kepada figur-figur yang memiliki elektabilitas tinggi (permintaan pasar tinggi).

Ironisnya, strategi untuk menang pemilu ini justru menjadi penghalang bagi pembangunan institusi partai yang kuat dan berbasis ideologi. Partai dominan seperti PDI Perjuangan tidak sepenuhnya hancur, melainkan beradaptasi dengan menciptakan sistem hibrida. Partai diuntungkan oleh jaringan para broker modular ini, namun tetap memegang kendali atas sumber daya dan mekanisme pencalonan yang lebih besar. Ini seperti sebuah perusahaan besar yang mengizinkan franchise otonom, namun tetap mengontrol merek utama dan pasokan bahan baku. Kekalahan ketiga kader yang pindah menunjukkan bahwa "pasar" ini masih memiliki batas, di mana kekuatan institusional partai yang mapan masih menjadi pemain dominan.

Menurut Heller dan Mershon (2009), perpindahan partai sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian ideologis, konflik internal, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan, atau strategi pribadi untuk mencapai posisi kekuasaan yang lebih baik. Heller dan Mershon menekankan bahwa perpindahan partai bukan sekedar pengaruh dari faktor internal partai tapi juga oleh persaingan antar partai.

Analisis terhadap tiga kader yang berpindah partai menunjukkan manifestasi konkret dari "modul yang dapat dilepaskan" (*detachable modules*). Masing-masing kasus merepresentasikan tipe dan skala modul politik yang berbeda, namun dengan pola yang konsisten: loyalitas massa terikat pada figur, bukan pada institusi partai.

Kasus Suradnyana – Modul Skala Regional

Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan contoh broker tingkat tinggi. Dengan rekam jejak sebagai Bupati Buleleng selama dua periode dan mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng, ia memiliki modal politik yang sangat besar. Pemicu

kepindahannya ke Partai Gerindra untuk maju sebagai Calon Wakil Gubernur Bali adalah kekecewaan personal atas pembatalan rekomendasi pencalonan istrinya sebagai anggota DPR RI oleh PDI Perjuangan.

Modul politik yang ia kontrol berbasis kewilayahan yang kuat di Bali Utara (Buleleng), yang ditopang oleh jaringan yang telah ia bangun selama menjabat, termasuk hubungan dekat dengan para pemimpin adat (bendesa) dan komunitas pendukung yang dikenal sebagai "Semeton PAS". Bergabungnya PAS dengan koalisi lawan dianggap sebagai sebuah keuntungan strategis yang signifikan. Ida Bagus Yoga Adi Putra dari tim pemenangan Mulia-PAS menyatakan, "bersama Pak Agus Suradnyana banyaklah positifnya... basisnya cukup kuat di Buleleng".

Meskipun pasangan Mulia-PAS pada akhirnya kalah dalam kontestasi tingkat provinsi, dampak dari modul PAS sangat terlihat pada data perolehan suara. Pasangannya meraih 153.444 suara di Buleleng, angka tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali. Hasil ini membuktikan bahwa modul politik PAS memiliki loyalitas geografis yang solid dan dapat "dilepaskan" dari PDI Perjuangan untuk kemudian "ditanamkan" pada kendaraan politik baru (Gerindra) demi tujuan elektoral yang berbeda.

Kasus Mulyadi – Modul Komunitas

I Nyoman Mulyadi merepresentasikan figur strongman lokal yang memiliki kontrol kuat atas basis massa yang terorganisir. Sebagai mantan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kediri, Tabanan, kekecewaannya memuncak setelah berulang kali gagal mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan, baik untuk pencalonan legislatif maupun sebagai Calon Bupati Tabanan. Kegagalan ini mendorongnya untuk maju melalui Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju.

Bentuk modul yang dikontrol oleh Mulyadi sangat unik, yaitu sebuah kelompok pendukung yang terlembagakan secara formal bernama SEMUT (Semeton Mulyadi Tabanan). SEMUT berfungsi layaknya organisasi kuasi-politik, lengkap dengan logo, struktur, dan kemampuan mobilisasi massa yang independen. Ketika Mulyadi tidak mendapat rekomendasi, SEMUT menggelar aksi protes di kantor DPC dan DPD PDI Perjuangan, sebuah demonstrasi nyata bahwa loyalitas mereka tertuju

pada figur Mulyadi, bukan partai. Menurut I Nyoman Wintara, pengurus SEMUT, gerakan ini menjadi mesin politik utama Mulyadi, terutama karena mesin partai pengusungnya (Golkar) dinilai tidak berjalan efektif akibat adanya dugaan kesepakatan informal dengan pihak lawan.

Dalam Pilkada Tabanan, meskipun kalah dari pasangan petahana PDI Perjuangan, pasangan Mulyadi-Ardika berhasil meraih 100.104 suara. Yang paling signifikan, ia mendominasi perolehan suara di basisnya, Kecamatan Kediri, dengan 25.230 suara. Kasus ini menjadi contoh ekstrem dari sebuah modul yang telah mengalami pelembagaan sedemikian rupa sehingga mampu beroperasi secara mandiri, bahkan ketika kendaraan politik formalnya tidak memberikan dukungan maksimal.

Kasus Yandinata – Modul Jaringan Personal

I Putu Alit Yandinata adalah contoh kader militan yang membangun modul politiknya melalui kultivasi jaringan personal jangka panjang. Setelah empat periode menjabat sebagai anggota DPRD Badung dari PDI Perjuangan, ia memutuskan mundur dan maju sebagai Calon Wakil Bupati melalui Partai Gerindra setelah PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada pasangan lain. Modul politik Alit Yandinata tidak berbasis pada organisasi massa yang kaku, melainkan pada "ikatan emosional" yang ia pelihara sejak 2009 dengan jaringan adat dan komunitas lokal di daerah pemilihannya, khususnya Kecamatan Abiansemal. Jaringan informal ini kemudian diwadahi dalam sebuah kelompok relawan bernama 5AY Official. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa basis dukungannya tidak bergantung pada struktur partai, melainkan pada hubungan personal yang dibangun melalui kehadiran rutin dalam berbagai kegiatan adat dan sosial di masyarakat.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Kefford, Moffitt, dan Werner (2022) yang menunjukkan bahwa dalam konteks politik modern, *populist attitudes* tidak hanya dibentuk oleh ideologi, tetapi juga pola komunikasi personal para aktor politik dengan komunitas atau pemilihnya. Loyalitas pemilih lebih banyak terbangun melalui interaksi langsung dengan figur kandidat, bukan melalui struktur formal dan ideologis partai politik.

Hasil Pilkada Badung menunjukkan bahwa meskipun pasangannya kalah secara keseluruhan, Alit Yandinata berhasil meraih kemenangan telak di "kandangnya", Kecamatan Abiansemal, dengan perolehan 22.562 suara. Kemenangan di basis personalnya ini menjadi bukti konkret bahwa modul yang ia bangun bersifat mandiri dan efektif. Loyalitas pemilih di wilayah tersebut terbukti dapat dipindahkan lintas partai, menegaskan bahwa keberhasilan elektoralnya selama ini lebih banyak ditopang oleh relasi personal yang ia bangun ketimbang oleh mesin partai semata.

Analisis Hasil Temuan

Meskipun ketiga kasus menunjukkan kemampuan modul personal untuk dapat dilepaskan dan dimobilisasi, hasil akhir Pilkada 2024 menjadi ujian realitas yang mengungkap batas-batas kekuatan modularitas. Fakta bahwa ketiga kader tersebut kalah dalam kontestasi masing-masing—PAS di tingkat provinsi, Mulyadi di Tabanan, dan Yandinata di Badung—menjadi titik analisis yang krusial. Kekalahan ini menunjukkan bahwa sekalipun seorang broker dapat membawa gerbong pendukung intinya, kekuatan tersebut tidak cukup untuk menandingi keunggulan struktural dari mesin partai yang mapan seperti PDI Perjuangan.

Partai yang terlembaga secara kuat memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh modul personal, antara lain: 1) kontrol atas alokasi sumber daya negara dan jaringan patronase yang lebih luas, 2) mesin politik yang mengakar hingga ke tingkat desa dan banjar, 3) identitas merek (*brand identity*) partai yang lebih dikenal luas, dan 4) kemampuan untuk mengkonsolidasikan berbagai faksi dan kepentingan di bawah satu komando terpusat. Ketika seorang kader keluar dari ekosistem ini, ia kehilangan akses terhadap seluruh infrastruktur pendukung tersebut dan harus bertarung dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem politik di Bali dan mungkin di banyak daerah lain di Indonesia beroperasi sebagai sebuah sistem hibrida. Ini bukanlah sebuah transisi linear dari model partai institusional ke model partai modular. Sebaliknya, partai dominan seperti PDI Perjuangan secara strategis menggunakan para broker modular untuk mengamankan suara dan menjaga

kehadiran di tingkat lokal. Partai diuntungkan oleh jaringan personal mereka. Namun, partai tetap memegang kendali tertinggi atas mekanisme pencalonan dan struktur politik-ekonomi yang lebih besar.

Dalam kerangka ini, pembelotan kader bukanlah sebuah kegagalan sistem, melainkan sebuah hasil yang dapat diprediksi dari struktur hibrida ini. Pembelotan adalah momen di mana para broker menguji batas otonomi mereka, dan hasil pemilu menjadi mekanisme di mana partai dominan "mendisiplinkan" mereka dan menegaskan kembali kekuatan institusionalnya. Sebagai perbandingan, di India fenomena *political defection* atau perpindahan wakil terpilih dari satu partai ke partai lain merupakan praktik yang cukup umum, meskipun telah diatur secara hukum melalui *Anti-Defection Law*. Studi oleh Sharma, P., Sinha, S., & Saini, V. K. (2023) yang berjudul *"The Impact of Political Defection on Democratic Stability: A Case Study of India"* mengeksplorasi bagaimana defeksi wakil legislatif mempengaruhi stabilitas demokrasi, terutama ketika loyalitas terhadap partai lemah. Penelitian oleh Jensenius, F. R., & Suryanarayan, P. (2022) yang berjudul *"Party System Institutionalization and Economic Voting: Evidence from India"* mengatakan ketika ikatan antara kandidat dan partai kuat, pemilih lebih cenderung memberi penghargaan terhadap prestasi ekonomi. Sebaliknya ketika ikatan ini lemah, pemilih lebih responsif terhadap figur individu dan bukan institusi partai.

Ekosistem politik klientelistik yang cair, dimana loyalitas dinegosiasikan dan kekuasaan diperebutkan secara terus-menerus antara pusat (partai) dan para broker. Hal ini menantang pandangan bahwa modularisasi akan serta-merta menyebabkan keruntuhan partai. Sebaliknya, ini menunjukkan bentuk politik kepartaian yang lebih tangguh, meskipun kurang demokratis dan lebih transaksional, di mana partai dominan mampu mengelola, alih-alih menghilangkan, fragmentasi internal. Tabel berikut menyajikan analisis komparatif dari ketiga studi kasus, yang menyoroti pola konsisten dari kekuatan dan keterbatasan modul politik personal.

Tabel 1. Analisis Komparatif Perpindahan Kader dan Modul Politik di Pilkada Bali 2024

Karakteristik	Kasus 1: Putu Agus Suradnyana (PAS)	Kasus 2: I Nyoman Mulyadi	Kasus 3: I Putu Alit Yandinata

Posisi di PDI-P	Mantan Bupati Buleleng 2 Periode, Mantan Ketua DPC PDI-P Buleleng	Ketua PAC PDI-P Kediri, Tabanan	Anggota DPRD Badung 4 Periode
Pemicu Konflik	Kekecewaan terkait rekomendasi partai di tingkat nasional (caleg DPR RI untuk istri)	Merasa tidak mendapat ruang dalam penjaringan Caleg DPRD Provinsi dan Calon Bupati	Tidak mendapatkan rekomendasi partai untuk maju dalam Pilkada Badung
Kendaraan Baru	Partai Gerindra (sebagai Calon Wakil Gubernur Bali)	Partai Golkar & Koalisi Indonesia Maju (sebagai Calon Bupati Tabanan)	Partai Gerindra (sebagai Calon Wakil Bupati Badung)
Bentuk Modul	Jaringan personal berbasis kewilayahan (Bali Utara) dan hubungan dengan tokoh-tokoh adat	Organisasi relawan yang terstruktur dan dilembagakan: SEMUT (Semeton Mulyadi Tabanan)	Jaringan relawan personal (5AY Official) dan jaringan adat yang dipelihara jangka panjang
Hasil Elektoral	Kalah di Pilgub. Memperoleh suara signifikan di Buleleng (153.444 suara)	Kalah di Pilbup. Memperoleh suara signifikan di basisnya di Kec. Kediri (25.230 suara)	Kalah di Pilbup. Unggul di dapil asalnya di Kec. Abiansemal (22.562 suara)
Implikasi Analitis	Menunjukkan modul dapat dipindahkan lintas kabupaten, namun kekuatannya terbatas saat melawan mesin	Menunjukkan modul dapat diorganisir secara formal dan sangat loyal di basis teritorial yang terkonsentrasi.	Menunjukkan modul politik dibangun dan dipelihara secara personal, terpisah dari struktur formal partai.

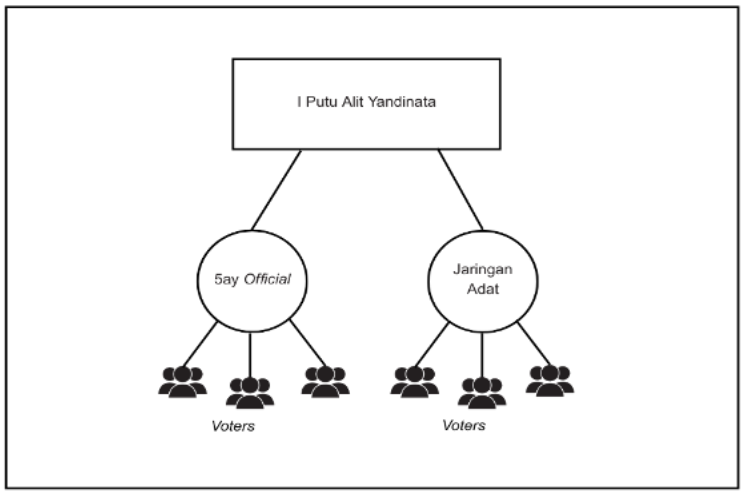
	partai di tingkat provinsi.		

Sumber: Peneliti diolah Berdasarkan Hasil Wawancara, 2025

Penelitian ini membuktikan dan mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di internal partai PDI Perjuangan Bali dapat merubah tatanan institusionalisasi partai PDI Perjuangan Bali yang semula merupakan partai kader, saat ini mulai menunjukan proses modularisasi. Ketegangan dan konflik yang terjadi mengakibatkan lepasnya kontrol partai PDI Perjuangan Bali terhadap kadernya yang dalam hal ini merupakan aktor penghubung.

Partai PDI Perjuangan Bali tidak dapat memberikan sebuah sanksi yang signifikan sehingga kader yang berpindah tetap bisa mencalonkan diri dan memindahkan massanya. Ketiga mantan kader PDI Perjuangan Bali yang menjadi objek penelitian yaitu Putu Agus Suradnyana, I Nyoman Mulyadi, dan I Putu Alit Yandinata mewakili figur aktor penghubung dalam modular parties. Mereka memiliki basis massa atau modul yang terorganisir dan solid. Ketika mereka berpindah partai, basis dukungan atau modul akan mengikuti dan terikat pada aktor penghubungnya masing- masing.

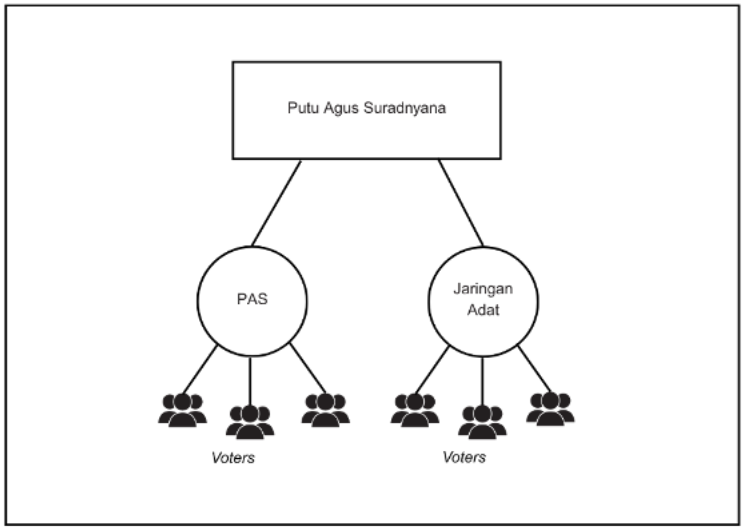
Gambar 1. Modul I Putu Alit Yandinata



Sumber: Peneliti diolah Berdasarkan Hasil Wawancara, 2025

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa I Putu Alit Yandinata memobilisasi dukungan melalui dua modul utama, yaitu komunitas 5ay Official dan jaringan adat di Kabupaten Badung. Kedua modul ini berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan dirinya dengan basis pemilih. Ini menandakan bahwa kekuatan elektoral I Putu Alit tidak bertumpu pada identitas partai, tetapi terfokus pada jaringan sosial personal yang telah ia bangun di luar struktur formal partai.

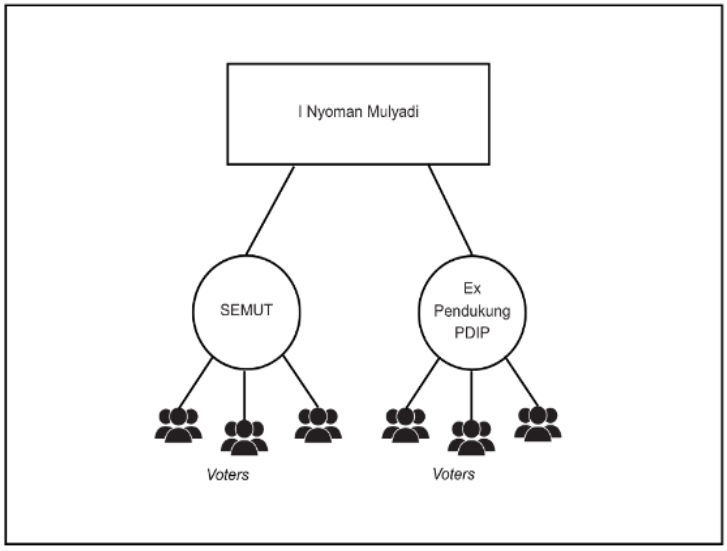
Gambar 2. Modul Putu Agus Suradnyana



Sumber: Peneliti diolah Berdasarkan Hasil Wawancara, 2025

Selanjutnya, berdasarkan Gambar 3 bahwa struktur modul Putu Agus Suradnyana terdiri atas komunitas pendukung PAS dan jaringan adat di wilayah Buleleng. Keberadaan komunitas PAS sebagai identitas kolektif pendukung menegaskan adanya kekuatan mobilisasi massa yang bersifat loyal terhadap figur, bukan terhadap partai. Dengan latar belakang sebagai mantan Bupati Buleleng dua periode, Putu Agus memiliki pengaruh personal yang kuat dalam menentukan arah dukungan politik warga, bahkan setelah dirinya keluar dari PDI Perjuangan.

Gambar 3. Modul I Nyoman Mulyadi



Sumber: Peneliti diolah Berdasarkan Hasil Wawancara, 2025

Sedangkan dalam Gambar 4, terlihat bahwa I Nyoman Mulyadi membangun basis dukungannya melalui komunitas SEMUT (Semeton Nyoman Mulyadi) dan bekas jaringan pendukung PDI Perjuangan di Tabanan. Hal ini mengindikasikan bahwa I Nyoman Mulyadi tidak memulai dari nol ketika keluar dari partai, melainkan mengkonsolidasikan dukungan yang telah terbentuk selama ia aktif sebagai kader partai. Modul ini menjadi cerminan dari pola relasi patron-klien yang dibentuk secara personal, namun tetap mampu beroperasi dalam ruang elektoral yang kompetitif.

Berdasarkan ketiga model tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga aktor politik ini memiliki modul yang terstruktur dan beroperasi di luar garis partai, menunjukkan adanya kecenderungan modularisasi dalam tubuh PDI Perjuangan Bali. Modularisasi ini tidak hanya melemahkan kontrol partai terhadap kader, tetapi juga membuka ruang bagi kader untuk tetap bertahan secara elektoral meskipun telah keluar dari partai politik.

Para pemimpin politik (*leadership*) ini telah bertransformasi menjadi "aktor" yang lebih otonom. Kekuatan mereka tidak lagi hanya bersumber dari posisi dimana partai, tetapi dari modal politik personal yang mereka bangun secara mandiri (Pedersen, 2019). PDI Perjuangan Bali secara sadar "mengalihdayakan" (*outsourcing*) tugas mobilisasi massa kepada figur-figur kader yang kuat. Partai secara sengaja

"memberikan posisi kader untuk turun ke tengah masyarakat". Praktik ini memberikan ruang bagi para kader untuk membangun pusat kekuasaan otonom mereka sendiri. Ketiga studi kasus—Putu Agus Suradnyana (PAS), I Nyoman Mulyadi, dan I Putu Alit Yandinata—secara jelas menunjukkan bagaimana mereka membangun "modul" dukungan yang bersifat personal dan terpisah dari struktur partai. Mereka memiliki "Semeton PAS" , "SEMUT (Semeton Mulyadi Tabanan)" yang bahkan terlembagakan secara formal , dan "5AY Official". Ini adalah bukti konkret bahwa kepemimpinan mereka telah menjadi entitas politik tersendiri.

Disisi lain, tulisan ini menjelaskan perilaku para aktor dan strategi partai ini bukanlah terjadi dalam ruang hampa. Mereka secara aktif merespon dan beradaptasi dengan karakteristik pemilih yang semakin dinamis dan berorientasi pada figur. Strategi partai yang mengandalkan figur personal selaras dengan preferensi pemilih di tingkat lokal yang cenderung lebih melihat figur personal ketimbang afiliasi partai. Hal ini menunjukkan bahwa para aktor dan partai pada dasarnya mengikuti mekanisme pemilih untuk bisa menang. Mengacu pada kerangka Herbert Kitschelt, tulisan ini berargumen bahwa fungsi representasi telah bergeser dari institusi (partai) ke individu. Hal ini terjadi karena pemilih merasa lebih terhubung secara personal dengan para broker ini. Fungsi representasi sekarang diemban oleh figur yang dipandang memiliki kedekatan, aksesibilitas, dan kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara langsung (Söderlund, 2024). Ini merupakan cerminan dari aktor yang menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh pemilih.

Mekanisme modularisasi ini berjalan melalui praktik patron-klien dan brokerage. Relasi ini pada dasarnya bersifat transaksional dan responsif. Seorang broker/patron berhasil jika ia mampu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kliennya (pemilih), baik sumber daya maupun representasi personal (Hicken,2022). Ini adalah bentuk adaptasi langsung terhadap dinamika permintaan dari pemilih. Dengan demikian, pergeseran ini adalah pergeseran dimana *leadership* bertransformasi menjadi aktor mandiri menjadi strategi dan adaptasi terhadap mekanisme pemilih yang sangat dinamis. Keduanya adalah dua sisis dari mata uang yang sama dalam proses modularisasi dalam tulisan ini.

PDI Perjuangan Bali dalam hal ini dapat dikatakan sedang mengalami proses modularisasi, yakni transformasi dari partai kader menuju partai yang bergantung kepada kekuatan personal kader untuk mempertahankan basis elektoral. Dengan kata lain, partai PDI Perjuangan Bali perlahan- lahan mulai melupakan fungsinya sebagai rumah ideologi dan berubah menjadi wadah pragmatis yang bergantung kepada kekuatan individu kader atau aktor penghubungnya. Proses modularisasi ini ditandai oleh lemahnya konsolidasi internal dan kerapuhan ideologi partai PDI Perjuangan Bali. Dalam temuan penelitian ini, kader bukan hanya sebagai pengguna kendaraan partai politik, tetapi juga pemilik sah dari jaringan pemilih atau modul yang dapat dibawa ke mana saja sesuai dengan kebutuhan politiknya.

Temuan di Bali, ternyata sejalan dengan studi di Filipina. Sebuah penelitian oleh Paul Hutchcroft yang berjudul *Strong patronage, weak parties: The case for electoral system redesign in the Philippines* lemahnya kelembagaan partai di Filipina mendorong dominasi pesonalisasi politik daripada ideologi maupun program partai. Situasi ini pararel dengan konteks modularisasi di Bali, dimana partai dominan seperti PDI Perjuangan mulai mengandalkan jaringan personal kader. Kondisi serupa terjadi di India, menurut Chhibber, P. K., & Verma, R. (2018) pergeseran politik berbasis ideologi menuju personalisasi yang digerakan oleh jaringan sosial. Pergeseran tersebut menciptakan ruang bagi munculnya kandidat berbasis komunitas yang berfungsi sebagai broker politik atau modul otonom. Dalam konteks ini, modularisasi di India tidak semata-mata melemahkan institusi partai, tetapi membentuk sistem baru dimana partai bergantung pada kekuatan sosial dan jaringan komunitas. Sebagaimana yang terjadi juga di Bali.

Dengan demikian, proses modularisasi yang terjadi pada PDI Perjuangan Bali merupakan sebuah refleksi sebuah partai yang berani mengambil strategi baru dalam mempertahankan eksistensinya dari pemilu ke pemilu lainnya. Proses modularisasi dalam temuan penelitian ini merupakan konsekuensi partai PDI Perjuangan Bali yang memberanikan diri untuk mengambil langkah strategi baru dengan menempatkan kader sebagai aktor penghubung yang pada akhirnya cenderung memberikan ruang kader partai politik untuk berdiri secara mandiri dan memiliki jaringan pemilih atau modul yang setia.

Kemudian, dalam perspektif konsep brokerage, ketiga tokoh Putu Agus Suradnyana, I Nyoman Mulyadi, dan I Putu Alit Yandinata tidak hanya berperan sebagai kandidat dalam kontestasi elektoral, tetapi juga berfungsi sebagai simpul strategis yang menghubungkan antara kepentingan partai dan aspirasi masyarakat pemilih. Merujuk pada pandangan Aspinall (2014), broker dalam konteks politik elektoral di Indonesia cenderung bersifat mandiri, memiliki kecakapan dalam membaca dinamika preferensi pemilih, dan mampu menjaga konsistensi jaringan politiknya secara mandiri, bahkan ketika mereka tidak lagi berada dalam struktur formal partai.

Ketika hubungan antara broker dan partai mengalami kerapuhan seperti dalam kasus konflik internal atau tidak terpenuhinya aspirasi pencalonan, para broker ini secara cepat dapat mengambil langkah politik sendiri dengan berpindah partai. Menariknya, basis pendukung mereka tetap solid dan loyal, tidak terpengaruh oleh perubahan afiliasi partai. Hal ini memperlihatkan bahwa daya tarik dan loyalitas massa tidak ditentukan oleh kedekatan dengan institusi partai, melainkan oleh hubungan langsung dan kepercayaan terhadap figur pemimpin lokal. Dalam hal ini, keberadaan jaringan relawan seperti SEMUT, PAS, dan 5AY Official bukanlah sekadar perangkat kampanye, melainkan bagian dari sistem modular yang menopang kekuatan elektoral aktor penghubung secara independen dari struktur resmi partai dalam bentuk modul.

Lebih dalam, hubungan yang terjalin antara para kader tersebut dengan basis pendukung mereka juga dapat dijelaskan melalui kacamata relasi patron-klien. Dalam hubungan semacam ini, figur politik memainkan peran sebagai patron yang memberikan akses pada sumber daya politik dan sosial, sementara pendukung berperan sebagai klien yang menukar kesetiaan dan suara mereka dalam bentuk dukungan elektoral.

Hubungan ini bersifat pragmatis dan personal, bukan ideologis atau programatik, dan berakar pada pertukaran timbal balik antara tokoh dan masyarakat. Dalam konteks partai modular, relasi ini memperlihatkan bahwa kader tidak hanya menjadi penghubung, tetapi juga pemilik kekuasaan yang dapat mengatur distribusi suara secara langsung. Bahkan ketika mereka tidak lagi menjadi bagian dari struktur

partai tertentu, otoritas sosial-politik yang mereka miliki tetap efektif dalam menjaga keberlanjutan loyalitas pemilih.

Sementara itu, melalui kerangka logic of constituency representation yang diperkenalkan oleh Herbert Kitschelt (1989), idealnya representasi politik seharusnya dibangun melalui struktur formal partai dan mekanisme institusional yang mewakili aspirasi kolektif konstituen. Akan tetapi, dalam konteks lokal Bali, logika ini telah mengalami pergeseran mendasar. Representasi politik kini lebih banyak dijalankan oleh individu-individu berpengaruh secara personal di komunitas, bukan oleh struktur partai.

Fungsi representasi tidak lagi diemban oleh partai sebagai institusi, melainkan oleh figur yang dipandang memiliki kedekatan, aksesibilitas, dan kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara langsung. Kondisi ini menandakan bahwa kelembagaan partai tidak lagi menjadi kekuatan utama dalam proses representasi politik sebaliknya, kekuatan tersebut berpindah ke tangan para aktor penghubung yang lebih responsif dan kontekstual dalam membaca situasi lokal.

Secara keseluruhan, temuan ini mengungkap bahwa proses modularisasi dalam tubuh PDI Perjuangan Bali telah memunculkan konfigurasi baru dalam hubungan antara partai, kader, dan pemilih. Dalam konteks ini, partai tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya pengontrol arah politik massa, melainkan hanya sebagai kendaraan politik bagi figur- figur yang memiliki basis sosial kuat. Ketergantungan pada aktor lokal sebagai aktor penghubung, ditambah dengan relasi patron-klien yang bersifat transaksional dan pergeseran representasi dari institusi ke individu, mencerminkan bahwa kekuatan elektoral kini sangat ditentukan oleh kemampuan aktor penghubung dalam merawat dan menggerakkan modul- modul suara yang dimilikinya. Oleh karena itu, perpindahan kader dari satu partai ke partai lain tidak dapat sekadar dipahami sebagai mobilitas politik biasa, melainkan sebagai ekspresi dari perubahan struktural dalam pola hubungan politik lokal yang makin bersifat personal, fleksibel, dan terfragmentasi.

Proses modularisasi yang terjadi dalam tubuh PDI Perjuangan Bali merupakan konsekuensi atas keberanian partai PDI Perjuangan Bali untuk mengkombinasikan struktur partai kader dengan aspek partai modular. Walaupun PDI Perjuangan Bali

tidak dapat dikatakan sebagai partai modular sepenuhnya, tetapi dalam strategi-strateginya di lapangan PDI Perjuangan Bali mulai mengadopsi aspek partai modular dengan memanfaatkan aktor penghubung untuk memobilisasi massa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa PDI Perjuangan Bali tengah mengalami proses modularisasi yang signifikan. Fenomena perpindahan tiga kader strategisnya menjelang Pilkada Serentak 2024 bukanlah sekadar insiden yang dipicu oleh konflik personal atau pragmatisme sesaat, melainkan merupakan konsekuensi struktural dari cara partai beroperasi. Putu Agus Suradnyana, I Nyoman Mulyadi, dan I Putu Alit Yandinata terbukti bertindak sebagai "aktor penghubung" yang memiliki dan mengelola jaringan dukungan massa atau "modul" secara mandiri. Loyalitas pemilih terhadap mereka terikat pada hubungan personal yang dibangun di luar kerangka institusional partai, bukan pada afiliasi kepartaian.

Modularisasi ini ditandai oleh dua gejala utama: pertama, melemahnya kontrol ideologis dan struktural partai terhadap kader dan basis massanya; dan kedua, meningkatnya ketergantungan partai pada kekuatan figur personal untuk memobilisasi suara. Dalam dinamika ini, partai bergeser perannya dari sebuah "rumah ideologis" menjadi sekadar "kendaraan elektoral" yang bersifat sementara. Ketika insentif politik yang ditawarkan partai tidak lagi selaras dengan kepentingan kader, mereka dengan mudah berpindah kendaraan, dan yang terpenting, mereka mampu membawa serta modul pemilihnya. Dengan demikian, pertanyaan penelitian terjawab: perpindahan kader PDI Perjuangan Bali memang sangat dipengaruhi oleh proses modularisasi yang dialami oleh partai itu sendiri.

Temuan studi ini memperkaya kajian mengenai modularisasi partai politik khususnya di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan pergeseran penting dalam lanskap politik lokal. Fungsi representasi formal partai melemah, kontrol atas suara bergeser dari institusi ke individu, dan ruang bagi mobilitas kader beserta modul pemilihnya menjadi semakin terbuka. Penelitian lanjutan disarankan untuk

mengeksplorasi keberadaan modularisasi di provinsi lain untuk menguji apakah modularisasi merupakan fenomena khas Bali atau bagian dari tren nasional. Selain itu, riset mendalam tentang strategi partai dalam mengelola hubungan dengan *broker* dan modul pemilih akan memperkaya literatur mengenai pelembagaan partai di era demokrasi yang semakin terpersonalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ambardi, Kuskridho. (2008). Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Aspinal, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.

Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. Critical Asian Studies, 46(4), 545-570.

Aspinall, E. and Berenschot, W., 2019. Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor

Berenschot, W., 2018. The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. Comparative political studies, 51(12), pp.1563-1593.

Chandra, K. (2007). Counting heads: A theory of voter and elit behavior in patronage democracies. Patrons, clients, and policies: Patterns of democratic accountability and political competition, 84-109.

Chhibber, P. K., & Verma, R. (2018). Ideology and identity: The changing party systems of India. Oxford University Press.Indonesia.

Churniawan, E. (2024). Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa. Ahmad Dahlan Legal Perspective, 4(2), 78-96.

Creswell, W. (2024) 4.2 Karakteristik Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Kualitatif 45.

Deleuze, G., Guattari, F., & Massumi, B. (1986). Nomadology: The war machine (p. 113). New York: Semiotext (e).

Detik.com. (2024, 21 Juni). *PAS cerita statusnya di PDIP hingga pencoretan sang istri dari caleg DPR RI*. Detik. https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7510133/pas-cerita-statusnya-di-pdip-hingga-pencoretan-sang-istri-dari-caleg-dpr-ri

Djarot Saiful Hidayat & Endi Haryono. (2008). *Politik dan Ideologi PDI Perjuangan 1987–1999: Penemuan dan Kemenangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Duverger, M. (1954). 1963. Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State.

Erviantono, T., Zuryani, N., & Vandenberg, A. (2024). Modular parties, customary networks, and constructivist institutionalism. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 1-28.

Feith, H. (2007). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Equinox Publishing.

Geers, S., & Bos, L. (2017). *Split-ticket voting in the Netherlands: A party-centered approach*. Electoral Studies, 48, 324-332.

Hanif, H., 2009. Politik klientelisme baru dan dilema demokratisasi di Indonesia. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 12(3), pp.327-351.

Heller, W. B., & Mershon, C. (2005). Party switching in the Italian Chamber of Deputies, 1996–2001. The Journal of Politics, 67(2), 536-559.

Hicken, A., Aspinall, E., Weiss, M. L., & Muhtadi, B. (2022). Buying brokers: Electoral handouts beyond clientelism in a weak-party state. World Politics, 74(1), 77-120.

Hutchcroft, P. (Ed.). (2020). Strong patronage, weak parties: The case for electoral system redesign in the Philippines. World Scientific.

Jensenius, F. R., & Suryanarayan, P. (2022). Party system institutionalization and economic voting: Evidence from India. *The Journal of Politics*, *84*(2), 814-830.

Jordi, K. I. (2021). Peran Banteng Ambengan Pesanggaran (BANTAS) Dalam Politik Dan Ekonomi Di Desa Pedungan. Skripsi, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Kefford, G., Moffitt, B., & Werner, A. (2022). Populist attitudes: Bringing together ideational and communicative approaches. Political Studies, 70(4), 1006-1027.

Khoiruly, R., Utomo, S., & Martini, R. (2013). Sistem Rekrutmen Dan Kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Kendal Era Reformasi (Studi Kasus Oligarki Di Kabupaten Kendal). Journal of Politic and Government Studies, 2(3), 311-325.

Kirchheimer, O. (1966). The transformation of the Western European party systems. *Political parties and political development*, 6, 177-200.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Rajawali Pers.

Lijphart, A. (1977). *Democracy in plural societies: A comparative exploration*. Yale University Press.

Lijphart, A. (1999). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. Yale University Press.

Mietzner, M. (2013). Political conflict and democracy in Indonesia. In *Political Conflict and Democracy in Indonesia*

Moffitt, B., & Tormey, S. (2014). Rethinking populism: Politics, mediatisation and political style. Political studies, 62(2), 381-397.

Novaes, L.M., 2015. Modular parties: Party systems with detachable clienteles (Doctoral dissertation, UC Berkeley).

Panebianco, A. (1988). *Political parties: organization and power*.

Pedersen, H. H. (2019). Two strategies for building a personal vote: Personalized representation in the UK and Denmark. *Electoral Studies*, 59, 17-26.

Piliang, Y.A. and Adlin, A., 2005. Transpolitika: dinamika politik di dalam era virtualitas.

Pos Bali. (2024, 25 April). *Pendaftaran di DPC PDIP Tabanan: I Nyoman Mulyadi setor formulir bacabup Tabanan, I Gede Purnawan setor formulir bacawabup*. Pos Bali. https://www.posbali.net/politik/1424593831/pendaftaran-di-dpc-pdip-tabanan-i-nyoman-mulyadi-setor-formulir-bacabup-tabanan-i-gede-purnawan-setor-formulir-bacawabup

Pradana, M. Y. A. (2020). Elit Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians. Journal Of Politics And Policy, 153-172.

Rachmayani, I., & Warganegara, A. (2023). Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(2), 389-398.

Radar Bali. (2024, 4 Juni). *Klir! Alit Yandinata Kembalikan KTA ke DPC PDI Perjuangan, Tegaskan Tarung di Pilkada Badung*. Radar Bali. https://radarbali.jawapos.com/politika/705011463/klir-alit-yandinata-kembalikan-kta-ke-dpc-pdi-perjuangan-tegaskan-tarung-di-pilkada-badung

Ramadhan, M.N. and Oley, J.D.B., 2019. Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1), pp.169-180.

Royyan, M. N., Sulaksono, T., & Wijaya, J. H. (2022). Konsolidasi Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemenangan Pilkada Pasca Konflik Internal Partai Tahun 2020. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 4(1), 59-71.

Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism, and democracy*. New York: Harper & Brothers.

Sharma, P., Sinha, S., & Saini, V. K. (2023). The Impact of Political Defection on Democratic Stability: A Case Study of India. *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, *8*(6), 137-141.

Söderlund, P., & von Schoultz, Å. (2024). Trajectories of the personal vote under open-list proportional representation: Evidence from Finland, 1999–2019. *Party Politics*, *30*(1), 12-23.

Suteja, I. G. A. S. D. (2021). *Aktor Penghubung dalam Modular Parties*. Skripsi, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

TR, M. R. (2016). Dilema pelembagaan partai golongan karya (golkar) di tingkat lokal: fenomena politik klan. Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, 2.

Tribun Bali. (2023, 16 Agustus). *Gelar aksi damai, simpatisan Nyoman Mulyadi akhirnya diterima di Kantor DPD PDIP Bali*. Tribun Bali. https://bali.tribunnews.com/2023/08/16/gelar-aksi-damai-simpatisan-nyoman-mulyadi-akhirnya-diterima-di-kantor-dpd-pdip-bali

White, S., Rose, R., & McAllister, I. (1997). *Party switchers: The effect of the electoral system on party loyalty*. Electoral Studies, 16(4), 441-456.